



Terapkan Sekolah tanpa Pungutan

Siapkan Dana Rp 34,8 M di APBD

JOGJA - Pendidikan di sekolah negeri di Kota Jogja mesti bebas pungutan. Pungutan dalam bentuk apapun.

Komitmen itu ditunjukkan Komisi D DPRD Kota Jogja dan Dinas Pendidikan Kota Jogja. Kedua lembaga tersebut sepakat

untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar tidak diwarnai pungutan sama sekali.

Nantinya biaya operasional untuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dana investasi bakal ditiadakan

► Baca *Terapkan...* Hal 11

Kudu Gratis Tenan

Kebutuhan biaya berdasar perhitungan sementara untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Kota Jogja.

Sekolah	Biaya Operasional	Dana Investasi	Jumlah Pelajar
SMA	RP 15,9 MILIAR	RP 5,06 MILIAR	5.740 ORANG
SMK	RP 8,8 MILIAR	RP 4,9 MILIAR	4.500 ORANG
Total dana RP 34,802 MILIAR			

GRAFIK: HERPIS KARTUNRADAR JOGJA

Hingga Desember Masih Bayar SPP

■ TERAPKAN...

Sambungan dari hal 1

Aturan itu akan diterapkan untuk pendidikan mulai jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Pelaksanaan program akan dilakukan bertahap.

"Tetapi khusus warga Kota Jogja yang bersekolah di sekolah negeri. Diharapkan sosialisasi sudah dilakukan bulan ini," jelas anggota Komisi D DPRD Kota Jogja M. Fauzan usai rapat ko-

ordinasi di gedung DPRD Kota Jogja kemarin (6/11).

Fauzan menilai, sekolah tanpa pungutan sudah merupakan komitmen dewan dengan disdik. Menurutnya, sejauh ini hanya jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang sudah melaksanakan program tersebut.

Dia berharap biaya untuk program sekolah bebas pungutan ini sudah tercantum dalam APBD 2014. Dengan demikian, dewan bersama disdik dapat melakukan pemetaan kebutuhan anggaran

pendidikan.

Menurutnya, program sekolah bebas pungutan segera diberlakukan bagi jenjang pelajar SMA dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Berdasar perhitungan sementara, biaya operasional untuk jenjang SMA bisa mencapai Rp 15,9 miliar dan SMK senilai Rp 8,8 miliar. Sedangkan dana investasi SMA sekitar Rp 5,05 miliar dan SMK sekitar Rp 4,9 miliar.

Melihat data sementara tersebut, total dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendi-

dikan gratis ini mencapai Rp 34,802 miliar. Jumlah itu dengan asumsi ada 5.740 pelajar SMA dan 4.500 pelajar SMK.

Data tersebut belum final. "Dewan akan bersikap keras saat program tersebut sudah berjalan. Jika terdapat keluhan siswa maupun orang tua soal pungutan, sekolah bersangkutan akan kita tindak langsung. Ini sebagai komitmen dewan dengan dinas pendidikan," terang dia.

Komisi D siap terus mendesak agar disdik mulai melakukan

sosialisasi ke sekolah-sekolah negeri terkait kebijakan bebas pungutan ini. Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Terpisah, Sekretaris Disdik Kota Jogja Budi Asrori berjanji segera menindaklanjuti kese-

pakatan tersebut. Instansinya siap melakukan sosialisasi.

Sosialisasi itu akan dilakukan dengan memberikan surat edaran ke setiap sekolah terkait program pendidikan tanpa pungutan. "Tentunya sampai akhir Desember siswa masih dikenai biaya SPP. Ini karena menyesuaikan pola

anggaran daerah," tegasnya.

Khusus kebijakan sekolah tanpa pungutan hingga SMA dan SMK nantinya lebih diperdalam dengan aturan wali kota. "Khusus untuk regulasinya berupa perwal sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada," ucapnya. (hrp/amd/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005